

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Sekolah sebagai salah satu lembaga yang membantu pemerintah dalam menyiapkan generasi penerus bangsa bertanggung jawab dalam menangani masalah pendidikan melalui usaha membimbing, mendidik dan melatih siswa, sehingga siswa tersebut memiliki kepribadian yang baik, berakhlak mulia, berjiwa kreatif, mandiri dan menjadi manusia yang bertanggung jawab. Sebagaimana yang tertuang dalam pasal 3 Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang SISDIKNAS yang berbunyi :

pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Sekolah sebagai lembaga pendidikan formal bertugas untuk mengembangkan potensi, kemampuan, bakat dan minat siswa yang memungkinkan mereka menjadi manusia-manusia yang dapat berkembang dengan baik, bahagia dan bertanggung jawab sebagai anggota masyarakat. Untuk mencapai tujuan ini sekolah harus melaksanakan banyak hal

misalnya, program pendidikan hendaknya ditunjang oleh kegiatan-kegiatan yang sejalan antara pimpinan sekolah, guru bidang studi, petugas Bimbingan dan Konseling ataupun semua karyawan sekolah bahkan orang tua siswa, masyarakat untuk mengikuti perkembangan pembangunan bangsa khususnya dibidang pendidikan.

Guru sebagai komponen manusiawi dalam proses belajar mengajar, ikut berperan dalam usaha pembentukan sumber daya manusia yang potensial dalam bidang pembangunan. Dalam rangka ini guru tidak semata-mata sebagai pengajar "*transfer of knowledge*" tetapi juga sebagai pendidik "*transfer of value*". Selain berperan sebagai pengajar dan pendidik, guru juga berperan sebagai pembimbing yang memberikan pengarahan cara menuntun siswanya dalam belajar.

Berkaitan dengan uraian di atas, guru memiliki peranan yang unik dan sangat kompleks di dalam proses belajar mengajar untuk mengantarkan siswanya pada taraf yang dicita-citakan. Sehingga dapat dikatakan bahwa pada setiap guru terletak tanggung jawab untuk membawa para siswanya pada suatu kedewasaan atau taraf kematangan tertentu. Oleh karena itu, setiap rencana kegiatan guru hanya bertujuan semata-mata demi kepentingan anak didik sesuai dengan profesi dan tanggung jawabnya

Dalam proses belajar mengajar, kurikulum merupakan salah satu faktor penting yang harus menjadi acuan. Suryadi dan Budimansyah dalam M. Mona Adha (2010: 1) mengemukakan bahwa kurikulum sekolah dewasa ini, cenderung menjadi satu-satunya "kambing hitam" yang di tuduh

sebagai faktor yang mengakibatkan rendahnya mutu pendidikan. Berbagai program peningkatan mutu pendidikan telah dilakukan melalui pembakuan kurikulum sekolah tahun 1975-1976, perubahan kurikulum 1984, dan perubahan kurikulum 1994. Namun sampai saat ini masih terdapat beberapa masalah dalam upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan, yang diduga disebabkan oleh masalah kurikulum sekolah yang tertulis.

Permasalahan-permasalahan itu adalah sebagai berikut:

- a. Proses pembelajaran yang masih terlalu berorientasi terhadap penguasaan teori dan hafalan dalam semua bidang studi menyebabkan pengembangan kemampuan belajar dan penalaran bagi para siswa sebagai inti dari keberhasilan pendidikan menjadi terhambat bahkan cenderung terabaikan.
- b. Kurikulum sekolah yang terlalu terstruktur dan sarat beban mengakibatkan proses pembelajaran di sekolah menjadi steril dengan keadaan dan perubahan lingkungan fisik dan sosial yang terjadi di lingkungan. Sehingga menjadi menjadikan proses belajar menjadi rutin, tidak menarik, dan tidak mampu memupuk kreatifitas baik untuk murid, guru maupun pengelola pendidikan di sekolah-sekolah untuk mengembangkan pendekatan pembelajaran yang inovatif.
- c. Proses pendidikan dan pembelajaran yang belum dikendalikan oleh suatu sistem penilaian yang terpercaya telah menyebabkan mutu pendidikan belum termonitor secara teratur dan objektif. Sulitnya melakukan perbandingan mutu pendidikan antar wilayah, antardaerah,

antarwaktu, antarnegara, dan sebagainya menyebabkan hasil-hasil evaluasi pendidikan tidak bisa berfungsi sebagai sarana umpan balik penyempurnaan pendidikan.

Pembelajaran merupakan bagian atau elemen yang memiliki peran yang sangat dominan untuk mewujudkan kualitas baik proses maupun lulusan (*output*) pendidikan. Dan hal ini sangat tergantung pada guru dalam melaksanakan proses belajar mengajar di kelas. Hal ini sama dengan apa yang dikemukakan oleh Muchith di bawah ini:

Artinya pembelajaran sangat tergantung dari kemampuan guru dalam melaksanakan atau mengemas proses pembelajaran. Pembelajaran yang dilaksanakan secara baik dan tepat akan memberikan kontribusi sangat dominan bagi siswa, sebaliknya pembelajaran yang dilaksanakan dengan cara yang tidak baik akan menyebabkan potensi siswa sulit dikembangkan atau diberdayakan. (Muchith, 2008: 1)

Berdasarkan pendapat di atas dapat dijelaskan bahwa, posisi guru memegang peranan penting untuk mengolah isi materi yang akan disampaikan kepada siswa di kelas. Semakin berkualitas baik itu dari segi isi materi dan strategi yang digunakan oleh guru, maka akan semakin baik hasilnya bagi siswa.

Pendidikan sebagai salah satu langkah mencerdaskan kehidupan bangsa dan menimbulkan potensi anak didik sesuai dengan apa yang termaktub dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 1 dan 2 yakni:

Pasal 1:

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan akhlak, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan Negara.

Pasal 2:

Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara RI Tahun 1945, yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.

Menurut pandangan Srijanti et al. (2008: 76) bahwa “Hak warga negara Indonesia terhadap negara telah diatur dalam UUD 1945 dan aturan hukum lainnya yang merupakan turunan dari hak-hak umum yang digariskan dalam UUD 1945. Hak warga negara yang diperoleh dari Negara seperti hak untuk hidup secara layak, dan aman, pelayanan, dan hal lain yang diatur dalam undang-undang”.

Wawasan kebangsaan adalah cara pandang yang dilingkupi oleh rasa kebangsaan, paham kebangsaan dan semangat kebangsaan untuk mencapai cita-cita nasionalnya dan mengembangkan eksistensi kehidupannya atas dasar nilai-nilai luhur bangsa. Implementasi dan aktualisasinya dari berbagai hal yang erat kaitannya dengan pemikiran yang menyangkut aspek kehidupan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, hukum dan hankam, untuk membawa bangsa kearah kehidupan yang lebih maju dan lebih baik, sesuai dengan komitmen kebangsaan itulah yang disebut wawasan kebangsaan.

Menurut pendapat Fadjar (2005: 70) pendidikan dapat dikatakan sebagai :

wahana utama untuk memelihara serta menumbuhkan semangat kebangsaan itu, sebab pranata dan institusi pendidikan pada hakekatnya merupakan kekuatan pembangkitan gerakan watak semangat kebangsaan. Adanya pelaksanaan pengajaran pendidikan kewarganegaraan diharapkan dapat memberi andil bagi pembentukan wawasan kebangsaan, pendidikan kewarganegaraan dapat membentuk warga negara yang baik, yakni warga negara yang sanggup melaksanakan hak dan kewajibannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Berdasarkan pendapat diatas dapat dikatakan bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang majemuk terdiri dari berbagai suku, ras, adat istiadat, bahasa, budaya, agama dan kepercayaan. Fenomena tersebut, sebenarnya dapat menjadi modal yang kuat apabila diolah dengan integritas bangsa yang tinggi, hal mana bangsa Indonesia tidak hanya dapat membangun dirinya untuk menjadi suatu bangsa yang utuh, tetapi juga layak untuk memperoleh tempat sebagai bagian dari dunia internasional, yang dapat hidup berdampingan dengan bangsa-bangsa lain di dunia.

Komitmen yang kuat dan konsisten terhadap prinsip dan semangat kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, perlu ditingkatkan secara terus menerus untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara historis, negara Indonesia telah diciptakan sebagai Negara Kesatuan dengan bentuk Republik. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan

kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. (Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945).

Dalam perkembangannya sejak Proklamasi 17 Agustus 1945 sampai dengan penghujung abad ke-20, rakyat Indonesia telah mengalami berbagai peristiwa yang mengancam keutuhan negara. Untuk itu diperlukan pemahaman yang mendalam dan komitmen yang kuat serta konsisten terhadap prinsip dan semangat kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Konstitusi Negara Republik Indonesia perlu ditanamkan kepada seluruh komponen bangsa Indonesia, khususnya generasi muda sebagai generasi penerus.

Permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini adalah berlangsungnya pendidikan yang kurang bermakna bagi pembentukan wawasan kebangsaan siswa, yang berakibat merosotnya kualitas kepribadian dan kesadaran akan makna dari kehidupan. Jika hal itu diabaikan, maka menurunnya wawasan kebangsaan siswa pada masa mendatang merupakan suatu hal yang tidak dapat dibendung lagi oleh siapa pun. Sebenarnya, menurunnya wawasan kebangsaan dikalangan siswa telah banyak dirasakan oleh masyarakat, maupun kalangan pendidikan itu sendiri.

Di zaman globalisasi ini banyak dari pemuda Indonesia yang membanggakan produk-produk yang dihasilkan oleh luar negeri seperti baju, sepatu, tas, dll. Sedangkan barang-barang buatan anak bangsa dianggap sebelah mata. Ini dikarenakan oleh kesadaran rasa nasionalisme pemuda sekarang ini sudah semakin berkurang dibandingkan dengan dulu. Dulu pemuda seperti kita berjuang demi memerdekakan Indonesia, selalu bangga dan cinta dengan tanah air. Tapi sekarang, banyak pemuda sudah kurang rasa nasionalisme, contohnya pemuda sekarang lebih banyak yang melanggar peraturan hukum di Indonesia seperti ugal-ugalan di jalan, tawuran, bahkan penggunaan narkoba. Pengetahuan dan pengamalan pancasila siswa rendah, siswa hanya bisa menghafalnya yang mereka dengar setiap upacara bendera di sekolah. Siswa kurang memahami budaya daerah seperti tarian daerah yang semakin kurang diminati, siswa lebih memilih *modern dance*. Dari cara berpakaian banyak siswa yang cenderung ke budaya Barat. Mereka menggunakan pakaian yang minim bahan yang memperlihatkan bagian tubuh yang seharusnya tidak kelihatan. Pada hal cara berpakaian tersebut jelas-jelas tidak sesuai dengan kebudayaan kita

Dengan berkurangnya rasa nasionalisme maka semakin berkurangnya kesadaran bahwa pemuda adalah yang akan melanjutkan dan memelihara Indonesia. Maka dari itu pemerintah melakukan berbagai cara dan upaya untuk meningkatkan rasa nasionalisme pemuda Indonesia. Dengan memasukkan mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan kedalam kurikulum pendidikan.

Pendidikan di Indonesia diharapkan dapat mempersiapkan peserta didik menjadi warga negara yang memiliki komitmen kuat dan konsisten untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hakikat Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara kebangsaan modern. Negara kebangsaan modern adalah negara yang pembentukannya didasarkan pada semangat kebangsaan atau nasionalisme yaitu pada tekad suatu masyarakat untuk membangun masa depan bersama di bawah satu Negara yang sama walaupun warga masyarakat tersebut berbeda-beda agama, ras, etnik, atau golongannya.

Guru PKn mengajar lebih banyak mengejar target yang berorientasi pada nilai ujian akhir, di samping masih menggunakan model konvensional yang monoton, aktivitas guru lebih dominan daripada siswa, akibatnya guru seringkali mengabaikan proses pembinaan tatanan nilai, sikap, dan tindakan; sehingga mata pelajaran PKn tidak dianggap sebagai mata pelajaran pembinaan warga negara yang menekankan pada kesadaran akan hak dan kewajiban tetapi lebih cenderung menjadi mata pelajaran yang jenuh dan membosankan.

Untuk menghadapi kritik masyarakat diperlukan suatu model pembelajaran yang efektif dan efisien sebagai alternative, yang diharapkan mampu melibatkan siswa dalam keseluruhan proses pembelajaran dan dapat melibatkan seluruh aspek, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik siswa, serta secara fisik dan mental melibatkan semua pihak dalam

pembelajaran sehingga siswa memiliki suatu kebebasan berpikir, berpendapat, aktif dan kreatif.

Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945. Pendidikan kewarganegaraan juga harus dapat menumbuhkan jiwa patriotik, mempertebal rasa cinta tanah air (nasionalisme), dan meningkatkan wawasan kebangsaan siswa.

SMP N 1 Pagelaran merupakan salah satu lembaga pendidikan di Kabupaten Pringsewu. Sekolah tersebut memiliki 61 orang guru, 923 orang murid, dan 24 kelas. Berdasarkan penelitian pendahuluan yang dilaksanakan di SMP N 1 Pagelaran Kabupaten Pringsewu. Peneliti menemukan banyak siswa yang saat ini kurang memiliki semangat kebangsaan (nasionalisme), sehingga penghargaan terhadap nilai-nilai kehidupan bangsa menjadi rendah karena kurang mendapat tempat dalam kehidupan. Berikut ini adanya tabel tentang semangat kebangsaan siswa (nasionalisme) SMP N 1 Pagelaran Kabupaten Pringsewu.

**Tabel 1 : Hasil pra survei melalui observasi tentang semangat kebangsaan (nasionalisme) pada siswa SMP N 1 Pagelaran Pringsewu.**

No	Aspek yang diobservasi	Jumlah	Tinggi	Sedang	Rendah
1.	Sikap siswa terhadap berlangsungnya upacara bendera	67	-	-	✓
2.	Sikap siswa terhadap lingkungan tempat tinggal (keluarga, teman, sekolah)	43	-	✓	-
3.	Pengetahuan siswa tentang pengamalan pancasila	46	-	-	✓
4.	Penghargaan siswa terhadap hasil produksi dalam negeri	34	-	-	✓
5.	Sikap siswa terhadap budaya daerah	50	-	-	✓

**Sumber : Data primer siswa SMP N 1 Pagelaran Kabupaten Pringsewu**

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui, bahwa hasil prasuvei melalui wawancara menunjukkan kecenderungan rasa kebangsaan (nasionalisme) pada siswa SMP N 1 Pagelaran Kabupaten Pringsewu berada pada tingkat sedang ke rendah yaitu berjumlah 240 siswa. Beberapa faktor yang diduga menjadi penyebab rendahnya rasa nasionalisme siswa di sekolah di antaranya kurangnya pemahaman tentang konsep nasionalisme, faktor globalisasi, faktor lingkungan, faktor perubahan sosial yang tidak terkendali. Atas dasar inilah penulis menganggap perlu untuk mengetahui bagaimana Peranan Pembelajaran.

## **B. Identifikasi masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sikap nasionalisme siswa relatif rendah.
2. Kurangnya pembinaan terhadap sikap kecintaan terhadap nilai-nilai kebangsaan (nasionalisme).
3. Rendahnya pengetahuan dan wawasan tentang nasionalisme.
4. Kurangnya pembinaan terhadap sikap bela negara.
5. Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan belum efektif.

## **C. Pembatasan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah di atas maka penelitian ini dibatasi pada

1. Sikap nasionalisme siswa
2. Penguasaan Konsep Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan

## **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah dan pembatasan masalah di atas maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

”Bagaimanakah Peranan Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Meningkatkan Sikap Nasionalisme Siswa di SMP N 1 Pagelaran Kabupaten Pringsewu Tahun Ajaran 2011/2012 ”.

## **E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan Peranan Penguasaan Konsep Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Meningkatkan Sikap Nasionalisme siswa di SMP N 1 Pagelaran Kabupaten Pringsewu Tahun Ajaran 2011/2012

### **2. Kegunaan dan manfaat penelitian**

#### **a. Kegunaan teoretis**

Secara teoritis penelitian ini berguna untuk mengembangkan konsep pendidikan, khususnya Pendidikan Kewarganegaraan dan pendidikan nilai moral pancasila, yakni dalam lingkup wilayah kajian pendidikan nilai dan moral Pancasila, karena membahas tentang nasionalisme.

#### **b. Kegunaan Praktis**

1. Sebagai suplemen bahan ajar pada mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan yaitu :
  - a. SMA kelas X semester 1 tentang memahami hakikat bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
  - b. SMP kelas IX semester 1 tentang usaha pembelaan negara
2. Hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai masukan yang positif bagi sekolah maupun perguruan tinggi agar dalam pelaksanaan proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan

lebih menekankan pada aspek kognitif, afektif, dan psikomotor sehingga dapat meningkatkan rasa nasionalisme siswa maupun mahasiswa.

## **F. Ruang Lingkup Penelitian**

### **1. Ruang Lingkup Ilmu**

Ruang lingkup ilmu dalam penelitian ini adalah Ilmu pendidikan, khususnya Pendidikan Kewarganegaraan dengan bidang kajian Pendidikan Pancasila, karena membahas tentang nasionalisme.

### **2. Ruang Lingkup Objek**

Objek penelitian ini adalah Peranan penguasaan konsep pembelajaran pendidikan kewarganegaraan untuk meningkatkan rasa nasionalisme siswa di SMP N 1 Pagelaran Kabupaten Pringsewu Tahun Ajaran 2011/2012

### **3. Ruang Lingkup Subjek**

Subjek penelitian ini adalah Siswa di SMP N 1 Pagelaran Kabupaten Pringsewu Tahun Ajaran 2011/2012

### **4. Ruang Lingkup Wilayah**

Penelitian ini dilaksanakan di SMP N 1 Pagelaran Kabupaten Pringsewu Tahun Ajaran 2011/2012.

## **5. Ruang Lingkup Waktu**

Waktu penelitian ini dilakukan sejak dikeluarkan surat izin penelitian pendahuluan oleh Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung pada tanggal 20 juli 2011 sampai dengan selesai.